

## BAB II

### KERJASAMA MILITER THAILAND, AMERIKA SERIKAT, DAN TIONGKOK

#### 2.1 Hubungan Thailand-Tiongkok

Tiongkok, sebagai kekuatan regional memiliki populasi yang besar, teritori yang luas dan sangat dekat dengan Thailand, memiliki dampak besar dalam kebijakan politik luar negerinya sejak zaman kuno dari Sukhotai (1237-1350), Ayuthaya (1350-1767), Thonburi (1767-1782) dan Bangkok (1782-sekarang).<sup>32</sup> Transaksi yang menguntungkan ini pun berakhir pada pertengahan abad ke-19 ketika kerajaan Tiongkok mendapati beberapa kesulitan dari masalah domestik dan tantangan dari luar. Dikarenakan kekacauan tak berkesudahan yang terjadi di Tiongkok, membuat penduduk Tiongkok pun bermigrasi ke Thailand untuk melarikan diri dan mendapatkan kesejahteraan dan mencoba menemukan peluang di Thailand. Dalam hal ini, membuat hubungan masyarakat dari Tiongkok ke Thailand memiliki peranan besar dalam perdagangan secara informal diantara dua negara ini.<sup>33</sup>

*“Through migration, intermarriage, and assimilation the Chinese have had a long and important impact on nation building in Thailand. In addition to sustained dominance of large sectors of urban commerce, Chinese impact is felt through the existence of second, third and fourth generation Chinese-Thais in all sectors of the Thai economy and polity. While the national influence of the Chinese on Thailand has been well recognized, rather little is known about*

---

<sup>32</sup> Subsaeng Promboon, *Sino-Siamese Tributary Relations 1289-1853*, Bangkok: Thai Wattanapanich Press, 1982, hal. 20.

<sup>33</sup> Sarasin Viraphol, *Tribute and Profit: Sino-Siamese Trade 1652-1858*, Cambridge: Harvard University Press, 1977. Hal 92

*their lives or livelihood beyond what was noticeable in large urban settlements.*”<sup>34</sup>

Setelah komunis menang di daratan Tiongkok dan pembentukan Republik Rakyat Tiongkok pada Oktober 1949, militer Thailand dan pemimpin sipil Thailand muncul kecurigaan dengan Tiongkok. Dikarenakan komunis Tiongkok menjadi sebuah ancaman bagi Thailand dalam beberapa hal, salah satunya adalah ketidakcocokan antara ideologi komunis Tiongkok dengan ideologi Thailand yaitu “kenasionalan, Buddhisme dan Monarki”<sup>35</sup>

## **2.2 Kerjasama Militer Thailand**

Dari tahun 1855 hingga saat ini, Thailand memiliki kebijakan luar negeri yang paling sukses di Asia Tenggara. Diplomasi Thailand memungkinkannya untuk menghindari penjajahan langsung, kerusakan selama Perang Dunia II, reaksi dari pihak yang kalah dalam Perang Indocina Kedua (1959-75), dan kemungkinan bahwa pendudukan Vietnam atas Kamboja (1978-1991).<sup>36</sup> Saat ini, diplomasi Thailand sedang disesuaikan dengan kebangkitan Tiongkok sambil mempertahankan perjanjian keamanan militer Thailand dengan Amerika yang sudah jauh berjalan.

Thailand telah memaksimalkan kepentingan nasionalnya walaupun secara militer dan ekonomi lemah. Ini telah dilakukan melalui diplomasi yang cerdas, yang meyakinkan suksesi kekuatan-kekuatan besar yang sedang merajai di kancah

---

<sup>34</sup> Lauro, D. (1988). Chinese migration and settlement in a Thai village. *International Migration/Migrations Internationales/Migraciones Internacionales*, 26(3), 301-10.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Ohmae, K. (1992). The rise of the region state. *Foreign Aff.*, 72, 78.

Internasional di mana Thailand bekerjasama dengan mereka, padahal kenyataannya, Thailand selalu memupuk hubungan secara bersamaan dengan koalisi kekuatan yang berseberangan. Thailand selalu melakukan lindung nilai daripada melakukan berkomitmen penuh pada kekuatan atau koalisi yang muncul, dan inilah yang dilakukan Thailand dengan Tiongkok dan AS selama abad ke-21.<sup>37</sup> Sebagai negara yang kecil dan lemah secara militer, Thailand harus hidup dengan akalunya karena menghadapi kebangkitan Tiongkok sambil terus memupuk kepercayaan Amerika.<sup>38</sup>

### 2.2.1 Kerjasama Militer Thailand-Amerika Serikat

Thailand yang dimana pada saat itu dikenal sebagai Siam menjadi mitra diplomatik pertama Amerika di Asia ketika kedua negara menandatangani *Treaty of Amity and Commerce* pada tahun 1833.<sup>39</sup>

*"The treaty's preface provides for commercial intercourse between the parties "as long as Heaven and Earth shall endure". Article I creates "perpetual peace" between the parties; Article II demands free trade with few restrictions; Article III, a depth duty in lieu of import and export duties, tonnage, licence to trade, or any other charge whatever; Article IV (and X,) for most ideal nation status; and Article V, reprieve for US citizens in cases of shipwreck. Article VI introduces early US concepts of bankruptcy fortification. Article VII provides that US citizens taken by pirates and brought within the kingdom, be set at liberty and their property restored."*<sup>40</sup>

Meskipun berfokus pada hubungan komersial, bukan keamanan, perjanjian itu pada dasarnya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kedua negara.

---

<sup>37</sup> Chen, I. T. Y., & Yang, A. H. (2013). A harmonized Southeast Asia? Explanatory typologies of ASEAN countries' strategies to the rise of China. *The Pacific Review*, 26(3), 265-288. Hal. 270

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Wilson, R. R. (1956). A Decade of New Commercial Treaties. *American Journal of International Law*, 50(4), 927-933.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Sementara Siam dapat mendiversifikasi hubungannya dengan kekuatan Barat sebagai strategi untuk menghindari penjajahan oleh kekuatan Eropa, sedangkan, Amerika Serikat memperoleh akses ke daratan Asia Tenggara yang mana hal ini sama dengan negara-negara Eropa yang telah beroperasi di wilayah tersebut.

Selama Perang Dunia II, Gerakan Thailand Merdeka (*Seri Thai*) yang diprakarsai oleh M.R. Seni Pramoj, Duta Besar Thailand untuk AS, telah didukung penuh oleh Amerika Serikat.<sup>41</sup> Gerakan ini dengan cepat menginspirasi kegiatan serupa di Inggris dan yang dimana didukung oleh gerakan bawah tanah anti-Jepang di Thailand. Hal ini pun menjadikan awal dari hubungan bilateral yang terjadi dari negara Thailand dan Amerika Serikat, termasuk kerja sama politik, militer, dan ekonomi antara kedua negara.

Berbagai bantuan dan pembangunan infrastruktur, yang didukung oleh Amerika Serikat dan Bank Dunia, disusun sebagai hasil dari aliansi antara Amerika Serikat dan Thailand. Yang paling menonjol di antaranya adalah fasilitas militer termasuk lapangan terbang buatan AS di U-Tapao, pelabuhan di Sattahip dan Jalan Raya Mittrapharb ke yang menuju ke timur laut Thailand. Investasi dari sektor swasta juga berkembang. Yang penting, kedua negara menandatangani *Treaty of Amity dan Economy Relation* pada tahun 1966,

*“The treaty also permits for privileged treatment for Thai businessmen applying for visas to conduct business in the United States. The rules for their applications are kept to a minimum. Under the treaty the US Congress may not ratify judicious laws against Thai firms. Their profits may*

---

<sup>41</sup> Martin, J. V. (1963). Thai-American Relations in World War II. *The Journal of Asian Studies*, 22(4), 451-467.hal. 455

*be freely dispatched to Thailand and their assets may not be expropriated."*<sup>42</sup>

Perjanjian ini memberi orang Amerika hak istimewa dalam melakukan bisnis di kerajaan Thailand, yang di mana pada tahun tersebut peraturan bagi investasi asing sangat ketat. Secara khusus, perjanjian itu memungkinkan warga negara Amerika dan bisnis yang tergabung di Amerika Serikat, atau di Thailand, untuk mempertahankan kepemilikan saham mayoritas atau perusahaan yang sepenuhnya dimiliki di Thailand, dan dengan demikian bisnis tersebut memiliki hukum dasar yang sama seperti halnya kepemilikan warga negara Thailand.

Aliansi melemah ketika Amerika Serikat menarik diri dari Perang Vietnam pada tahun 1973 dan akhirnya mengosongkan pangkalan yang berada di Thailand pada tahun 1976.<sup>43</sup> Para pemimpin Thailand, memandang kehadiran militer Amerika sebagai peningkatan liabilitas. Bagaimanapun, Washington tidak mau mempertahankan pasukan Amerika di daratan Asia Tenggara. Thailand mulai untuk membatasi akses militer AS ke fasilitas-fasilitas militer setelah Insiden *Mayaguez* pada tahun 1975, ketika Amerika Serikat memutuskan untuk mengambil tindakan secara sepihak.<sup>44</sup> Insiden itu dimulai dengan penyitaan kapal kontainer Amerika *Mayaguez* oleh Khmer Merah. Amerika Serikat bereaksi dengan mengirimkan operasi militer dari pangkalan udara U-Tapao di Thailand tanpa berkonsultasi dengan Bangkok. Kemudian, dengan

---

<sup>42</sup> Limaye, S. P. (2007). United States-ASEAN relations on ASEAN's fortieth anniversary: A glass half full. *Contemporary Southeast Asia*, 447-464.

<sup>43</sup> Tucker, S. C. (Ed.). (2011). *The Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History*. [4 volumes]: A Political, Social, and Military History. ABC-CLIO.

<sup>44</sup> *Ibid.*

pengambilalihan komunis dari negara-negara Indocina, Thailand menjadi mulai menjadi negara yang lebih dingin dalam segi keamanan. Ketika ancaman dari Vietnam membahayakan setelah invasi yang terus mereka lakukan dan pendudukan Kamboja pada akhir 1978, Bangkok harus mencari bantuan dari Beijing.<sup>45</sup>

Selama perang dingin, sebagian besar interaksi Thailand dengan AS terbatas hanya pada militer dan politik. Prinsip dari interaksi ini adalah adanya persamaan persepsi yaitu bagi Thailand, Amerika Serikat sama-sama memerangi melawan penyebaran Komunisme, sebuah ideologi yang dipandang orang Thailand bertentangan dengan gaya hidup dan budaya mereka. Untuk Amerika Serikat, Thailand menjadi negara garis depan yang berguna dalam menghentikan penyebaran Komunisme. Hubungan politik dan militer antara kedua negara berkembang lebih jauh selama Perang Korea dan Vietnam.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, beberapa peristiwa penting antara aliansi AS-Thailand pun terjadi. Yang pertama adalah penolakan Thailand terhadap proposal Amerika untuk memposisikan peralatan militer di perairan teritorial Thailand pada tahun 1994.<sup>46</sup> Yang kedua adalah kegagalan penjualan jet tempur FA-18, ketika Bangkok memutuskan untuk memangkas anggaran militernya sebagian besar karena kesulitan keuangan setelah krisis keuangan Asia 1997.<sup>47</sup> Yang ketiga adalah ketika

---

<sup>45</sup> Turley, W. S., & Race, J. (1980). The third Indochina war. *Foreign Policy*, (38), 92-116. Hal. 105

<sup>46</sup> Tow, W. T., & Taylor, B. (2013). Thailand's security policy: bilateralism or multilateralism? CHULACHEEB CHINWANNO. In *Bilateralism, Multilateralism and Asia-Pacific Security*. Routledge. Hal. 84-100.

<sup>47</sup> Prasirtsuk, K. (2017). An Ally at the Crossroads: Thailand in the US Alliance System. 2017). *Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century*, 115-132. Hal. 121.



Amerika Serikat bertanggung jawab atas tumpahan bahan kimia di bandara Hua Hin pada tahun 1999.<sup>48</sup>

Demikian pula, setelah tiga peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1990 an, hal itu sangat mempengaruhi sikap Thailand terhadap Amerika Serikat.<sup>49</sup> Pertama, Amerika Serikat menawarkan sedikit dukungan kepada Thailand dalam menanggapi dampak krisis keuangan Asia pada tahun 1997.<sup>50</sup> Antagonisme semakin meningkat ketika perusahaan-perusahaan Barat membeli perusahaan-perusahaan Thailand dengan harga jual yang tinggi. Sebaliknya, kekuatan regional seperti Jepang dan Tiongkok terlibat dan bekerja sama dengan negara-negara yang dilanda krisis. Sebagai contoh, Jepang menawarkan pinjaman langsung kepada Thailand di bawah inisiatif Miyazawa dan Tiongkok menahan diri untuk tidak mendevaluasi mata uangnya. Ini membuatnya lebih mudah bagi negara-negara Asia lainnya untuk pulih, terutama karena harga ekspor meningkat. Dalam hal ini, ASEAN + 3 (ASEAN plus Tiongkok, Jepang dan Korea) mewakili skema kerja sama regional yang signifikan, membina hubungan yang lebih erat antara kekuatan-kekuatan regional dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Thailand.

Kedua, orang Thailand enggan mendukung unilateralisme pemerintahan George W. Bush, yang menghasilkan kebijakan seperti kegagalan Amerika untuk meratifikasi Protokol Kyoto, perang melawan teror dan invasi ke Afghanistan dan Irak. Sikap

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Hewison, K. (2018). Thailand: An old relationship renewed. *The Pacific Review*, 31(1), 116-130.

<sup>50</sup> Krugman, P. (2017). Crises: The price of globalisation?. In *Economics of Globalisation*. Routledge. Hal. 31-50.

Thailand semakin diperkeras oleh kurangnya minat Amerika terhadap wilayah tersebut, yang ditunjukkan oleh absen berturut-turut Sekretaris Negara Amerika Serikat dari pertemuan tahunan *ASEAN Regional Forum* (ARF) selama tahun 2000-an.<sup>51</sup> Kedua peristiwa tersebut menodai citra AS untuk orang Thailand dan orang Asia Tenggara lainnya. Ini sangat kontras dengan citra Tiongkok, yang dipandang murah hati memberikan bantuan tanpa syarat kepada negara-negara ASEAN. Namun, setelah kunjungan Bush ke Thailand pada 2003 untuk KTT APEC,

*“President Bush reached Saturday night in Bangkok, Thailand, ahead of Monday’s summit with Asian and Pacific leaders that will focus on trade and security... Bush was the first U.S. president to discourse the Philippine Congress since Dwight D. Eisenhower in 1960. In his Manila speech, he also applauded the Philippine government for supporting the U.S.-led war in Iraq.”*<sup>52</sup>

Aliansi AS-Thailand dihidupkan kembali setelah Washington menunjuk Thailand sebagai sekutu non-NATO. Terlepas dari kekhawatiran masyarakat Thailand tentang perang AS di Irak dalam mengejar kepentingan minyaknya, Thaksin Shinawatra mengirim pasukan untuk mendukung AS di Irak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi Washington untuk memulai negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Thailand.

Ketiga, penangguhan bantuan dan kritik Washington terhadap Thailand setelah kudeta militer pada 2006 semakin mengasingkan banyak orang Thailand. Elit yang

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hal. 122

<sup>52</sup> *Bush in Thailand for APEC summit*, 18 Oktober 2003, <http://edition.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/southeast/10/18/bush.asia/index.html> diakses pada 12 Mei 2019



mendukung kudeta menuduh Washington gagal memahami konteks kerajaan. Beberapa berpendapat bahwa kudeta Thailand memecahkan kebuntuan politik. Namun, setelah kudeta semakin memperburuk perpolitikan yang ada di kerajaan. Sangat sedikit orang Thailand yang memahami Bagian 508 dari *US Foreign Operations Appropriations Act*,

*“None of the funds appropriated or otherwise made available pursuant to this Act shall be obligated or expended to finance directly any assistance to the government of any country whose duly elected head of government is deposed by military coup or decree.”*<sup>53</sup>

Tindakan ini memberikan pelarangan pemberian dana kepada pemerintah asing yang digulingkan dengan dekrit atau kudeta militer. Secara keseluruhan perasaan terhadap Amerika Serikat menjadi semakin beragam. Misalnya, kelompok-kelompok anti-Thaksin (pergerakan baju kuning) senang bahwa Thaksin pada suatu saat dilarang memasuki Amerika Serikat, suatu posisi yang membuat marah pendukung Thaksin (pergerakan baju merah). Setiap pernyataan AS tentang protes atau kekerasan di negara tersebut diterima secara berbeda oleh kedua kelompok ini. Kelompok-kelompok protes akan berbesar hati dengan menyiarakan kekhawatiran AS tentang pelanggaran hak asasi manusia, percaya bahwa protes Washington membantu mencegah pemerintah memerintahkan tindakan keras militer. Oposisi tidak akan senang dengan kritik AS. Singkatnya, tindakan atau kelambanan AS terhadap krisis politik Thailand dipandang negatif oleh salah satu dari kedua sisi pergerakan di Thailand.

---

<sup>53</sup> <https://www.congress.gov/109/plaws/publ102/PLAW-109publ102.htm>

Thailand adalah salah satu dari lima negara di kawasan Asia - Pasifik, dan satu dari dua negara di Asia Tenggara, yang memiliki perjanjian keamanan bilateral dengan AS. Perjanjian bantuan militer ditandatangani dengan Amerika Serikat pada tahun 1950 setelah berakhirnya Perang Korea.<sup>54</sup>

Menyadari peran strategis penting Thailand dan pengaruh stabilisasi Amerika Serikat di kawasan ini, kedua pemerintah sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis mereka untuk lebih memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan tersebut.

Pakta Manila pada tahun 1954 yang dihasilkan oleh SEATO, bersama dengan komunike Thanat-Rusk 1962, membentuk dasar hubungan keamanan AS-Thailand.<sup>55</sup> Meskipun SEATO dibubarkan pada tahun 1977, Pasal IV (1) dari Pakta Manila, yang menyerukan para penandatangan untuk "bertindak untuk memenuhi bahaya bersama" dalam hal konflik yang terjadi di daerah perjanjian tetap berlaku.<sup>56</sup> Thailand telah dianggap sebagai salah satu sekutu keamanan utama AS di Asia Timur, bersama dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, Filipina, dan mitra non-perjanjian Singapura.

Hubungan keamanan AS dengan Thailand memiliki landasan historis yang kuat berdasarkan upaya bersama dalam Perang Korea, Perang Vietnam, dan Perang Teluk

---

<sup>54</sup> Chanlett-Avery, E. (2010, June). Thailand: Background and US relations. LIBRARY OF CONGRESS WASHINGTON DC CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE.

<sup>55</sup> Suorsa, O., & Thompson, M. R. (2018). Choosing Sides? Illiberalism and Hedging in the Philippines and Thailand. *Panorama: Insights into Asian and European Affairs*, (02/2017), 63-76.

<sup>56</sup> Chachavalpongpan, P. (2016). Thailand in Sino-US Rivalry at the Crossroads of the Thai Internal Conflict. *RESEARCHERS IN EXILE*, 26.

Persia 1991.<sup>57</sup> Thailand mengirim lebih dari 6.500 tentara untuk bertugas di Komando PBB selama Perang Korea, di mana pasukan Thailand menderita lebih dari 1.250 korban.<sup>58</sup> Satu dekade kemudian, Amerika Serikat melancarkan serangan bom dan misi penyelamatan Vietnam Utara dan Laos dari Thailand.<sup>59</sup> Selama Perang Vietnam, hingga 50.000 pasukan AS berbasis di tanah Thailand, dan bantuan AS terus mengalir ke negara Thailand guna membantu melawan pemberontakan komunis yang berada di negara Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Thailand juga mengirim pasukan ke Vietnam Selatan dan Laos untuk membantu upaya AS. Ikatan keamanan yang erat berlanjut sepanjang Perang Dingin, dengan Thailand bertindak sebagai sekutu anti-komunis yang solid di wilayah tersebut. Pada kisaran tahun 1990-2005, pelabuhan dan lapangan terbang Thailand memainkan peran penting dalam menjaga aliran pasukan, peralatan, dan pasokan dalam perang Irak tahun 1991 dan 2003.

Pada tahun 2003, Presiden George W. Bush menunjuk Thailand sebagai sekutu non-NATO, hal ini pun membuka akses yang lebih banyak dalam mendapatkan bantuan luar negeri AS dan bantuan militer, termasuk jaminan kredit untuk pembelian senjata.<sup>60</sup> Thaksin mengizinkan pembukaan kembali *Vietnam-era* sebuah pangkalan udara AS di Utapao dan pangkalan angkatan laut di Sattahip, disini militer AS secara

---

<sup>57</sup> Hellmann, D. C. (2016). America, APEC, and the road not taken: International leadership in the post-Cold War interregnum in the Asia-Pacific. In *From APEC to Xanadu: Creating a Viable Community in the Post-Cold War Pacific*. Routledge. Hal 70-97

<sup>58</sup> Rodan, G., & Hewison, K. (2004). Neo-Liberal Globalisation, Conflict and Security: New Life for Authoritarianism in Asia?.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Chambers, M. R. (2005). 'The Chinese and the Thais are Brothers': the evolution of the Sino–Thai friendship. *Journal of Contemporary China*, 14(45), 599-629. Hal. 611.

logistik dapat mendukung pasukan di Afghanistan dan Timur Tengah. Thailand juga menyumbangkan pasukan untuk operasi AS di Irak dan Afghanistan pada awal 2000-an. Thailand menjadi basis logistik untuk AS dan upaya bantuan internasional setelah tsunami Samudra Hindia 2004 dan Topan Nargis 2008 di Burma. Operasi bantuan AS melalui udara dan laut untuk seluruh wilayah diarahkan keluar dari pangkalan udara Utao dan pangkalan angkatan laut Sattahip.

Dialog Strategis ke-4 Thailand - AS, yang diadakan pada Juni 2012, dipimpin oleh Sihasak Phuangketkeow, Sekretaris Tetap untuk Urusan Luar Negeri Thailand, dan Kurt Campbell, Asisten Sekretaris Negara untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri AS.<sup>61</sup> Para delegasi membahas kerja sama politik, keamanan, dan ekonomi dan komitmen bersama kedua negara untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di seluruh wilayah Asia-Pasifik.

*“In their meeting on June 13, Foreign Minister Surapong thanked Secretary Clinton for hosting the 2012 United States-Thailand Strategic Dialogue and the two sides emphasized their commitment to the enduring U.S.-Thai friendship.”*<sup>62</sup>

Kedua delegasi menekankan pentingnya integrasi regional dan Amerika Serikat menegaskan kembali dukungannya terhadap ASEAN dan kepentingannya bagi

---

<sup>61</sup> Lohman, W. (2011). Reinvigorating the US–Thailand Alliance. *Heritage Foundation Backgrounders*, (2609).

<sup>62</sup> Fourth United States-Thailand Strategic Dialogue, 15 Juni 2012, <http://www.scoop.co.nz/stories/WO1206/S00398/fourth-united-states-thailand-strategic-dialogue.htm> diakses pada 15 Mei 2019.

arsitektur kawasan yang mulai berkembang.<sup>63</sup> Kedua pemerintah menggarisbawahi dukungan berkelanjutan mereka untuk meningkatkan kerja sama dalam kerangka kerja regional lainnya, termasuk *Lower Mekong Initiative* (LMI), ASEAN Regional Forum (ARF), *ASEAN Defence Ministers Meeting* (ADMM +), *Asia Pacific Economy Forum* (APEC), dan *East Asia Summit* (EAS). Selama Dialog Strategis, delegasi Thailand memberi penjelasan kepada delegasi AS tentang inisiatif Konektivitas ASEAN dan perkembangan dari kawasan ini, termasuk kemajuan dalam mencapai Komunitas ASEAN pada tahun 2015.<sup>64</sup> Amerika Serikat menekankan dukungannya yang berkelanjutan untuk pembangunan Komunitas ASEAN.

Pada tahun 2014, Thailand dan Amerika Serikat telah melakukan latihan bersama yang dinamakan *Cobra Gold*. *Cobra Gold* ini diproyeksikan menjadi latihan bersama yang diagendakan tahunan. Baru-baru ini, lebih tepatnya pada tahun 2016, Thailand menjadi tuan rumah dalam latihan bersama angkatan laut yaitu *CARAT* (*Cooperation Afloat Readiness and Training Exercise*). *CARAT* adalah bagian dari serangkaian latihan angkatan laut bilateral yang dilakukan oleh Angkatan Laut AS dengan mitra dan sekarang melibatkan sembilan negara di Asia Selatan dan Tenggara - Bangladesh, Brunei, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Timor-Leste.<sup>65</sup> Aset AS yang berpartisipasi dalam *CARAT Thailand 2016* termasuk kapal

---

<sup>63</sup> Limaye, S. P., Feldman, A. C., & Council, U. A. B. (2017). *ASEAN matters for America/America matters for ASEAN*. Washington, DC: East-West Center.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Prashanth Parameswaran, 23 Juni 2016, US, Thailand Conclude Annual Military Exercise, <https://thediplomat.com/2016/06/us-thailand-conclude-annual-military-exercise/>, diakses pada: 05 Maret 2019

penghancur USS Stethem (DDG 63), kapal penyelamat USNS Salvor (T-ARS 52), USNS Montford Point (T-ESD 1), dan Orion P-3C.<sup>66</sup>

Namun, setelah kudeta 2014, Amerika Serikat menunjukkan sikap yang lebih bersebelahan terhadap junta militer. Washington menanggapi kudeta tersebut dengan serangkaian kritik dan sanksi, termasuk ancaman untuk memindahkan *Cobra Gold* yaitu latihan militer gabungan regional terbesar ke Darwin. Takut akan tindakan semacam itu hanya akan mendorong Thailand lebih jauh untuk mendekat dengan Beijing, Washington mengirim Wakil Sekretaris Negara Daniel Russell ke kerajaan Thailand pada awal 2015. Namun kunjungan tersebut gagal meningkatkan hubungan setelah ia membuat komentar kritis tentang junta militer selama pidatonya di Universitas Chulalongkorn. Dalam Laporan Perdagangan Manusia 2015, yang melihat Thailand masuk ke dalam kategori 'Tingkat 3', bahkan di bawah Myanmar dan Malaysia. Pada tahun 2015, Duta Besar AS, Glyn Davies, juga membuat komentar pedas di depan media yang mengarah langsung kepada Menteri Luar Negeri Thailand atas pelanggaran HAM, hal ini memicu kemarahan para pendukung kudeta. Dalam hal ini, tampaknya ada persepsi di kalangan militer dan pemerintah Bangkok bahwa Amerika Serikat tidak mendukung politik domestik Thailand.

---

<sup>66</sup> Tow, W. T. (2016). US–Southeast Asia Relations in the Age of the Rebalance. *Southeast Asian Affairs*, 35-54. Hal 40-41.



### 2.2.2 Kerjasama Militer Thailand-Tiongkok

Awal kerja sama militer Thailand dengan Tiongkok berawal dari tahun 1978-1984. Sebelum Desember tahun 1978<sup>67</sup>, Vietnam menginvasi Kamboja, bagi Thailand itu adalah ancaman yang paling menekan baginya. Pada tahun 1950-an, Tiongkok secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan dan pendorongan partai komunis di Thailand dan Malaysia.<sup>68</sup>

Setelah invasi Vietnam ke Kamboja pada bulan Desember 1978,<sup>69</sup> Thailand merasa terancam oleh kehadiran sejumlah besar pasukan Vietnam di sepanjang perbatasannya dengan Kamboja, dan beralih ke Tiongkok, yang dimana musuh Vietnam, untuk mendapatkan dukungan dan jaminan strategis. Selama dasawarsa berikutnya, Tiongkok memberikan jaminan itu dengan membawa tekanan militer terhadap Vietnam dengan cara menembakkan peluru ke seberang perbatasan antara kedua negara Tiongkok dan Vietnam, setiap kali militer Vietnam melanggar kedaulatan Thailand selama operasi pengejaran terhadap gerilyawan Khmer Merah yang menentang pendudukan Vietnam.<sup>70</sup> Sebagai imbalannya, Thailand memfasilitasi pengiriman persenjataan Tiongkok ke Khmer Merah.

Politik luar negeri Thailand memiliki penekanan pada masalah Kamboja. Pertama politik luar negerinya lebih mendominasi kepada peranan militer, yang dimana

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Bates Gill, *China Looks to Thailand: Exporting Arms, Exporting Influence*, Journal of Asian Survey, Volume 31 No. 6, June 1991: 526-539, hal. 528.

<sup>70</sup> *Ibid.*

dengan pembentukan Markas Besar Komando, dan *National Security Council* (NSC)<sup>71</sup>. *National Security* dibentuk dikarenakan tanggapan keamanan Thailand lebih tepatnya di perbatasan Kamboja, Laos, dan Burma. Dalam sikap perlawanan dengan Vietnam, Thailand dan Tiongkok memiliki kesamaan pandangan dalam menerjemahkan intervensi Vietnam ke Kamboja pada tahun 1978.<sup>72</sup>

Pada awalnya, Tiongkok lebih menekankan penanaman komunis di Thailand. Setelah Tiongkok berhasil membantu perjuangan revolusi yang ada di Thailand. Tiongkok mulai mengubah haluan nya untuk membantu perang Kamboja dengan Vietnam, dengan bantuan Thailand, Tiongkok membantu secara militer kelompok perlawanan Kamboja, lebih utama kelompok Khmer dan memukul mundur pemerintah Hanoi di Phnom Penh. Dengan memberikan bantuan langsung ke Thailand, Beijing memperkuat garis depannya dari serbuan militer Vietnam.<sup>73</sup> Pengiriman senjata dan tentara ke Thailand telah menjadi sebuah prinsip Tiongkok guna mencapai strategi dan tujuan politik disana.

Tiongkok juga membantu menyediakan sarana bagi Thailand untuk melawan agresi Vietnam. Hal itu dilakukan secara terus-menerus selama Krisis Kamboja yang menjadikan Thailand menjadi negara ASEAN pertama yang memperoleh peralatan militer dari Tiongkok. Dimulai pada awal 1980-an, Tiongkok menyalurkan tank-tank, kendaraan pengangkut personel lapis baja, artileri dan senjata anti-pesawat tanpa biaya

---

<sup>71</sup> Leszek Buszynski, *Op. Cit.*, hal. 722

<sup>72</sup> Bates Gill, *Op. Cit.* hal. 529

<sup>73</sup> *Ibid.* hal 530

atau bias dikatakan dengan memberikan “harga persahabatan” yang didiskon dengan sangat besar.<sup>74</sup> Walaupun senjata Tiongkok tidak secanggih senjata yang dipasok oleh Amerika Serikat ke Thailand, senjata itu terbukti memadai untuk pertempuran kecil yang dilancarkan oleh *Royal Thai Army* dengan pasukan Vietnam di sepanjang perbatasan. Pada tahun 1989, Thailand memesan enam peraga<sup>75</sup> dari Tiongkok, akan hal ini pula Thailand menjadi negara ASEAN pertama yang membeli kapal angkatan laut dari Tiongkok.<sup>76</sup> Menyusul penarikan Vietnam dari Kamboja pada tahun 1989, dan perjanjian perdamaian Internasional yang mengakhiri konflik, kerja sama militer antara Thailand dan Tiongkok menurun, meskipun kedua belah pihak terus bertukar delegasi militer tingkat tinggi sepanjang tahun 1990-an.<sup>77</sup>

Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Thaksin, hubungan militer antara Thailand dan Tiongkok semakin meningkat. Pada tahun 2001, Thailand menjadi negara ASEAN pertama yang mengadakan pembicaraan pertahanan dan keamanan tahunan dengan Tiongkok.<sup>78</sup> Ini merupakan perkembangan hubungan yang sangat penting karena membuka jalan bagi kerja sama militer yang lebih erat antara kedua negara di tiga bidang penting: pengamatan latihan masing-masing; memulai kembali penjualan senjata Tiongkok ke Thailand; dan pelatihan gabungan. Mulai tahun 2002, pengamat

---

<sup>74</sup> Ian Storey, 2013, *Southeast East Asia and the Rise of China*, New York: Routledge, hal 13

<sup>75</sup> Suatu nama yang digunakan bagi berbagai jenis [kapal perang](#) pada beberapa masa yang berbeda. Istilah ini merujuk pada beberapa peran dan ukuran kapal yang berbeda.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.* hal. 14

<sup>78</sup> Shambaugh, D. (2005). China engages Asia: reshaping the regional order. *International security*, 29(3), 64-99. Hal. 86

militer Tiongkok mulai menghadiri latihan gabungan tahunan *Cobra Gold*, sementara para perwira Thailand diundang untuk mengamati latihan *People's Liberation Army* (PLA).<sup>79</sup> Pada tahun 2001, Thailand setuju untuk membeli granat berpeluncur roket dari Tiongkok, dan setahun kemudian memesan dua kapal patroli lepas pantai dari Tiongkok yang dikirimkan tiga tahun kemudian.<sup>80</sup> Pada bulan September 2005, angkatan bersenjata Thailand menjadi militer Asia Tenggara pertama yang melakukan latihan gabungan dengan *People's Liberation Army* (PLA): latihan pembersihan ranjau darat di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja. Pada bulan November 2005, angkatan laut Thailand dan Tiongkok melakukan latihan gabungan di Teluk Thailand.<sup>81</sup>

Kudeta 2006 tidak mengganggu perkembangan hubungan militer Thailand-Tiongkok. Memang Beijing berusaha memanfaatkan celah yang diciptakan oleh kudeta itu dalam hubungan AS-Thailand. Menyusul penggulingan Thaksin, Amerika Serikat menanggihkan US \$ 24 juta dalam bantuan militer.<sup>82</sup> Menyatakan kudeta sebagai urusan internal Thailand, Beijing segera mengakui pemerintah militer baru dan menawarkan kredit pertahanan senilai US \$ 49 juta.<sup>83</sup> Kredit-kredit ini kemudian digunakan untuk membeli rudal anti-kapal C-802 buatan Tiongkok yang dikerahkan di

---

<sup>79</sup> Storey, I. (2012). China's bilateral defense diplomacy in Southeast Asia. *Asian Security*, 8(3), 287-310. Hal. 290

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Chachavalpongpan, P. (2009). Diplomacy under siege: Thailand's political crisis and the impact on foreign policy. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 31(3), 447-467. Hal 450

<sup>83</sup> *Ibid.*

fregat<sup>84</sup> yang diterima Bangkok dari Tiongkok pada awal 1990-an. Langkah dan ruang lingkup latihan militer Tiongkok-Thailand juga ditingkatkan pasca-perang. Pada Juli 2007, Pasukan Khusus Thailand dan Tiongkok melakukan pelatihan peperangan hutan dan kegiatan lainnya di Provinsi Guangdong, Tiongkok yang dimana hal tersebut adalah pertama kali Pasukan Khusus Tiongkok melakukan latihan dengan negara luar. Latihan Pasukan Khusus tindak lanjut diadakan setahun kemudian di Chiang Mai, Thailand, dan di Guilin, Tiongkok pada 2010. Pada tahun yang sama, angkatan bersenjata Thailand dan Tiongkok dari kedua negara berpartisipasi dalam latihan gabungan di Teluk Thailand. Latihan mariner kedua Thailand-Tiongkok berlangsung pada Mei 2012 di Guangdong.<sup>85</sup>

*“Follow-up Special Forces exercises were held a year later in Chiang Mai, Thailand, and in Guilin, China in 2010. In the same year, Thai and Chinese armed forces from both countries participated in joint exercises in the Gulf of Thailand. The second Thai-Chinese mariner training took place in May 2012 in Guangdong.”<sup>86</sup>*

Di bawah Perdana Menteri Yingluck, kerja sama militer bilateral terus berkembang. Sejak 2007, kedua belah pihak telah membahas kerja sama pertahanan, tetapi baru pada bulan April 2012 tercapai kesepakatan untuk bersama-sama membuat

---

<sup>84</sup> Suatu nama yang digunakan bagi berbagai jenis [kapal perang](#) pada beberapa masa yang berbeda. Istilah ini merujuk pada beberapa peran dan ukuran kapal yang berbeda.

<sup>85</sup> Gill, B. (2010). *Rising star: China's new security diplomacy*. Brookings Institution Press.

<sup>86</sup> *Ibid.*

beberapa peluncur roket.<sup>87</sup> Pada bulan Februari 2014, atas undangan angkatan bersenjata Thailand, personel PLA berpartisipasi dalam Komponen HA / DR dari *Cobra Gold*.<sup>88</sup>

### 2.3 Peralihan Kerjasama dengan Tiongkok

Hubungan Thailand-Tiongkok mulai semakin mencair setelah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, Indonesia, di mana Menteri Luar Negeri Thailand Pangeran Wan Waithayakorn bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai. Zhou Enlai, meyakinkan Pangeran Wan tentang niat damai Tiongkok terhadap Thailand, dia mencoba membersihkan banyak kecurigaan, termasuk menjelaskan bahwa pembentukan Wilayah Otonomi Dai adalah hasil dari restrukturisasi administratif internal.<sup>89</sup> Postur Zhou yang kondusif dan Prinsip-prinsip Lima Hidup Bersama yang Damai, Perdana Menteri Thailand pun mulai yang tertarik, Pibul Songkram. Selain itu, negosiasi informal AS-Tiongkok yang sedang berlangsung di Jenewa membuat Thailand gugup dan mendorong pemerintah Thailand untuk mencari pemulihan hubungan dengan Tiongkok.

Selanjutnya, pada tahun 2014, Thailand mengalami kudeta kembali. Hasil dari kudeta ini adalah turunnya Yingluck Shinawatra dari bangku Perdana Menteri. Setelah kudeta ini terjadi pemerintahan Thailand kembali di ambil alih oleh junta militer, yang

---

<sup>87</sup> Cha, V. D. (2007). Winning Asia-Washington's Untold Success Story. *Foreign Aff.*, 86, 98.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Barnouin, B., & Yu, C. (2006). *Zhou Enlai: A political life*. Chinese University Press. Hal. 199



dimana membuat kebijakan luar negerinya pun dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh junta militer.

Setelah kudeta 2014, pengeluaran pertahanan di Thailand mengalami peningkatan secara signifikan, Majelis Legislatif Nasional yang dipilih oleh junta militer telah mengusulkan \$ 7 miliar untuk pertahanan pada tahun fiskal 2019 - kenaikan \$ 1 miliar sejak kudeta 2014.<sup>90</sup> Junta militer memberikan pembelaan atas langkah yang diambil tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut diperlukan untuk menjaga sumber daya di Laut Andaman. Negosiasi pun masih dilakukan untuk fasilitas perbaikan peralatan militer Tiongkok di Thailand. Pembelian besar-besaran alutsista militer pun terjadi yang dimana pembeliannya paling banyak dengan Tiongkok.

Pada tahun 2017, pemerintah Thailand menyetujui pembelian tiga kapal selam Yuan pertama dari Tiongkok dengan harga masing-masing \$ 393 juta.<sup>91</sup> Militer Thailand pun telah membeli lebih dari selusin tank tempur Tiongkok VT-4 senilai 2,2 miliar baht (\$ 70 juta). Junta militer juga telah menyetujui pembelian 10 VT-4s senilai \$ 58 juta, yang dimana juga telah mencapai kesepakatan untuk mendapatkan 28 model.<sup>92</sup> VT-4 tersebut akan menggantikan tank-tank M41 buatan AS yang sudah tua yang telah digunakan sejak Perang Dunia II. Sebaliknya, Pemerintah

---

<sup>90</sup> Planes, tanks, subs: the Thai generals' shopping list, 14 Februari 2019, The Economic Times, <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/planes-tanks-subs-the-thai-generals-shopping-list/articleshow/67987641.cms?from=mdr> diakses pada: 03 Maret 2019

<sup>91</sup> Planes, tanks, subs: the Thai generals' shopping list, 15 Februari 2019, The News, <https://www.thenews.com.pk/print/432111-planes-tanks-subs-the-thai-generals-shopping-list> diakses pada: 03 Maret 2019

<sup>92</sup> *Ibid.*

AS hanya menjual sekitar \$ 437 juta perangkat militer dan helicopter *Black Hawk* ke Thailand melalui *Foreign Military Sales* (FMS) sejak 2014<sup>93</sup>, sebuah angka yang tidak meningkat seperti dengan Tiongkok. Thailand adalah sekutu lama AS, tetapi ikatannya sempat tegang setelah kudeta 2014.

Pada tahun 2018, pemerintah Thailand akan mengalokasikan 1,35% dari PDB negara itu untuk pertahanan, yaitu sekitar \$ 7 miliar. Diperkirakan 49% dari anggaran pertahanan akan diberikan bagi *Royal Army*, 20% lainnya diberikan kepada Angkatan Laut Kerajaan Thailand, dan 18% untuk Angkatan Udara Kerajaan Thailand.<sup>94</sup> Sisa dana didistribusikan ke *Office of the Permanent Secretary and Defence Technology Institute* (DTI) untuk pekerjaan penelitian dan pengembangan. Peningkatan anggaran pertahanan dapat di lihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Anggaran Pertahanan Militer Thailand tahun 2016-2018**

	2016	2017	2018
Anggaran Pertahanan	\$5.852,08	\$6.032,16	\$7.010,07
Produk Domestik Bruto (PDB)	\$381.284,01	\$425.037,14	\$538.998,45
Anggaran Pertahanan dalam% terhadap PDB	1,53%	1,42%	1,35%
Peningkatan Tahunan	4,00%	3,08%	16,21%

Sumber: <https://www.export.gov/article?id=Thailand-defense-and-security>

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Hewison, K. (2018). Thailand: An old relationship renewed. *The Pacific Review*, 31(1), 116-130. Hal.120-121

Berdasarkan data diatas, pengeluaran pemerintah dan militer dalam pertahanan dan peralatan Thailand terus meningkat drastis. Peningkatan anggaran ini terjadi sejak 2014. Faktor-faktor yang mendorong pengeluaran pertahanan adalah tingkat ancaman, pemeliharaan peralatan, penggantian, dan perombakan alutsista yang ada.

Berdasarkan data yang didapatkan dan telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya ketimpangan dalam pembelian senjata antara Tiongkok dan Amerika Serikat dari tahun 2014-2018. Dilihat dari pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Thailand, maka terlihat adanya peralihan pembelian senjata yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Ditahun 2014-2018 terlihat perbedaan dalam pembelanjaan antara Thailand dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa Thailand lebih memilih Tiongkok sebagai partner dalam perdagangan senjata.

#### **2.4 Persepsi Thailand Terhadap Tiongkok dalam Menjalin Kerjasama**

Persepsi tentang ancaman Tiongkok meluas setelah Tiongkok mulai mendukung pemberontakan Partai Komunis Thailand pada 1960-an. Tiongkok, pada tahun 1964, mensponsori pembentukan dua gerakan revolusioner, Front Patriotik Thailand dan Gerakan Independen Thailand.<sup>95</sup> Sepanjang 1960-an, Tiongkok berulang kali menyerukan kepada Partai Komunis dari Thailand untuk meningkatkan perjuangan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan "reaksioner" Thailand.<sup>96</sup> Bentrokan

---

<sup>95</sup> Chinwanno, C. (2009), *Op. Cit.* hal. 158.

<sup>96</sup> *Ibid.* hal. 160

bersenjata antara gerilyawan komunis di timur laut dan angkatan bersenjata Thailand mendorong Thailand untuk menjadi salah satu sekutu terdekat AS di Asia.

Ada perubahan persepsi dari Thailand atas Tiongkok khususnya dikalangan elit di kementerian luar negerinya di awal tahun 1970-an sebagai hasil dari perubahan peta strategi secara internasional dan regional. Salah satu perubahan terpenting adalah penyusunan kembali hubungan segitiga diantara kekuatan utama, Amerika, Tiongkok, dan Uni Soviet. Faktor penting lainnya adalah diterimanya RRC sebagai anggota PBB, yang dimana membuat Thailand mengevaluasi kebijakan politik luar negeri yang harus mengarah kepada Tiongkok. Faktor ekonomi pun menjadi penting dikarenakan ekonomi global pada awal tahun 70-an mengalami kekacauan sebagai hasil dari krisis energy.<sup>97</sup> OPEC menaikkan harga minyak, dan hasilnya minyak menjadi sangat langka dan mahal untuk banyak negara termasuk Thailand. Dikarenakan hal ini, Thailand mencoba mencari sumber minyak baru untuk industri nya. Tiongkok dengan minyak berlimpahnya, menjadi sumber yang baru.

Faktor penting lainnya adalah masuknya RRC ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggantikan Taiwan pada Oktober 1971, menunjukkan penerimaan dunia terhadap Tiongkok dan mendorong Thailand untuk meninjau kembali kebijakannya terhadap Tiongkok. Bahkan, Thailand mulai menyelidiki dan mengirim sinyal ke Tiongkok pada 1971.<sup>98</sup> Pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan Oktober 1971,

---

<sup>97</sup> Tongzon, J. L. (2005). ASEAN-China Free Trade Area: A Bane or Boon for ASEAN Countries?. *The World Economy*, 28(2), 191-210. Hal. 195

<sup>98</sup> *Ibid.* hal. 201.

delegasi Thailand yang dipimpin oleh Thanad Khoman meminta izin dari Thanom Kittikachorn untuk memilih mayoritas yang dimana keputusan memilih Tiongkok dalam menggantikan Taiwan. Akan tetapi, hal itu ditolak dan mengharuskan Thanad Koman *abstain* pada pemungutan suara yang menggantikan Taiwan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Namun demikian, Thanad menginstruksikan Perwakilan Thailand untuk mulai menghubungi perwakilan Tiongkok.

Perubahan regional di Asia Tenggara dimana komunis mengambil alih di negara Laos, Kamboja, dan Vietnam Selatan, dan mundurnya Amerika dari Asia Tenggara dan konfrontasi Vietnam membuat pemerintah Thailand memutuskan untuk menormalisasi hubungannya dengan Tiongkok. Salah satu faktor pentingnya adalah masalah keamanan luar negeri. Adapun beberapa peluang yang didapatkan oleh Thailand jika bekerjasama dengan Tiongkok, sebagai berikut.

**Tabel 2.2 Peluang yang Didapatkan Thailand dari Kerjasama Militer dengan Tiongkok**

	Peluang
Adanya geopolitik Indochina di kawasan Thailand-Tiongkok	- Memudahkan Thailand dalam me impor barang
Jarak Thailand dengan Tiongkok yang bersebelahan	

Adanya ikatan ‘ikatan’ budaya dengan Tiongkok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawatan alutsista yang lebih murah daripada alutsista dari AS</li> <li>- Teknologi yang canggih hampir sama dengan produk AS</li> </ul>
---	--

Pada faktanya Thailand adalah salah satu negara Asia Tenggara yang sangat ramah dengan Tiongkok. Kerja sama terus digaungkan dikarenakan adanya kepentingan geopolitik antara Tiongkok dan Thailand selama berabad-abad lamanya. Seperti halnya Burma dan Vietnam, Thailand juga merupakan tempat mayoritas orang Tionghoa tinggal sejak Dinasti Qing. Walaupun, Thailand tidak benar-benar berbagi perbatasan langsung dengan Tiongkok, Thailand tidak memiliki sengketa wilayah langsung dengan Tiongkok. Sejauh ini, Thailand tampaknya lebih mengambil manfaat ekonomi yang diberikan dengan bekerja sama dengan Tiongkok, daripada harus memberikan perasaan takut akan hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara. Secara umum, Thailand bersikap netral terhadap Sengketa Laut Cina Selatan yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara. Bagi Tiongkok pun, memiliki kepentingan terhadap negara bekas Indocina ini, yang dimana Tiongkok dapat secara penuh merealisasikan konsep *One Belt One Road* yang pada akhirnya dapat merekonsiliasi antara Myanmar dan Thailand.



Kerajaan Thailand, sebelumnya Siam, tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing. Sepanjang sejarahnya, Thailand telah disibukkan dengan dua hal: mengatasi perpecahan domestik untuk mengkonsolidasikan kekuatan Thailand itu sendiri dan menarik kekayaan dari luar tanpa membiarkannya merusak stabilitas internal.<sup>99</sup> Politik negara berfluktuasi terus-menerus karena pemerintah berturut-turut berusaha menyeimbangkan kepentingan regional dan asing. Namun, ekonomi dan budaya Thailand tetap relatif stabil.

Geografis Thailand yang sangat strategis pun memberikan alasan negara ini memiliki posisi kuat dalam percaturan di dunia Internasional. Semenanjung Asia Tenggara membentang ke selatan daratan besar Eurasia, dan yang dimana wilayah Thailand mendapatkan Laut Andaman di barat dan Laut Cina Selatan di timur.<sup>100</sup> Sisa semenanjung dapat dibagi menjadi dua bagian: Semenanjung Indocina, daratan yang membentang ke tenggara dan mengarah ke Laut Cina Selatan, dan Semenanjung Melayu, yang menjorok ke selatan menuju Malaysia dan Indonesia. Beberapa sungai besar mengalir dari Dataran Tinggi Tibet, termasuk Irrawaddy, Salween dan Mekong.<sup>101</sup>

Thailand berada di semenanjung Indochina dan Malaysia.<sup>102</sup> Pegunungan Dawna membatasi wilayah utara dan barat wilayah Thailand, sedangkan Khorat Plateau,

---

<sup>99</sup> Acharya, A. (2010). Democracy or death? Will democratisation bring greater regional instability to East Asia?. *The Pacific Review*, 23(3), 335-358. Hal. 338

<sup>100</sup> Linantud, J. L. (2008). Pressure and protection: Cold war geopolitics and nation-building in South Korea, South Vietnam, Philippines, and Thailand. *Geopolitics*, 13(4), 635-656.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Woodruff, D. S. (2003). Neogene marine transgressions, palaeogeography and biogeographic transitions on the Thai-Malay Peninsula. *Journal of Biogeography*, 30(4), 551-567. Hal. 555

dataran tinggi berumput di Semenanjung Indocina, yang terbentang di wilayah Timurnya. Di sebelah utara terdapat Dataran Tinggi Khorat, dan mengalir Sungai Mekong yang dimana menandai garis batas. Di selatan, Thailand meluas hingga ke ujung Semenanjung Malaya.

Langsung melalui jantung dari wilayah ini mengalir Sungai Chao Phraya dan anak-anak sungainya yaitu Ping, Wang, Yom dan Nan, yang semuanya berhulu dari pegunungan utara, di mana Doi Inthanon adalah puncak tertinggi di 8.415 kaki.<sup>103</sup> Sungai-sungai ini lebih kecil dari sungai Salween dan sungai Mekong yang mengalir dari ketinggian yang lebih tinggi. Chao Phraya berasal dataran aluvial yang subur dan dataran rendah yang telah menjadi jantung Thailand, dan membentuk delta besar.

Sungai Chao Phraya adalah tempat yang ideal bagi peradaban untuk berkembang. Banyaknya sungai menyediakan sumber air yang secara terus menerus dan membentuk dataran rendah yang subur di mana buah dan terutama padi dapat tumbuh berlimpah. Kelembaban tinggi, Bangkok adalah salah satu kota paling lembab di dunia, yang dimiliki negara Thailand pun memiliki fungsi untuk pertanian.

Diperkirakan, orang Tiongkok telah bermigrasi ke Thailand sudah semenjak enam abad terakhir. Dalam catatan *Global is Asian* (GIA), sejak zaman Raja Taksin yang memerintah Kerajaan Thonburi antara 1767 sampai 1782, sejumlah besar imigran Tiongkok telah ada dan berkontribusi pada tenaga kerja dan pajak negara. Antara 1825

---

<sup>103</sup> *Ibid.* hal. 558.

sampai 1910, populasi Tiongkok di Thailand meningkat tiga kali lipat dari 230 ribu menjadi 792 ribu jiwa.<sup>104</sup>

Selain faktor kebijakan pemerintah yang berusaha merangkul dan memberikan mereka hak produktif, ada banyak faktor lain yang membuat proses asimilasi ini berkembang secara cepat dan alamiah. Secara umum, ada banyak kesamaan antara Thailand dan Tiongkok. Makanan, misalkan, mereka sama-sama mengonsumsi nasi, ikan, dan daging babi.

Lalu asimilasi juga makin alamiah karena perkawinan campur. Pada awal abad 20, wanita Tionghoa hampir tidak ikut bermigrasi ke Thailand. Karenanya, migran Tionghoa di Thailand menikahi wanita lokal. Perkawinan ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut *luk-jin*, anak yang lahir dari ayah Tionghoa dan ibu Thailand. Asimilasi sebelum abad ke-20 juga didukung oleh tidak adanya sentimen nasionalis antara migran Tiongkok dengan penduduk Thailand.<sup>105</sup>

## 2.5 Thailand Pasca Kudeta 1946

Militer Thailand melakukan kudeta pada tanggal 22 Mei 1946 yang dimana hal ini menandakan kudeta kesembilan belas sejak penghapusan monarki absolut pada tahun 1932. Sejak kudeta, militer telah berupaya mengambil kendali penuh atas politik menjelang suksesi kerajaan yang tidak pasti. Raja Bhumibol Adulyadej telah naik takhta sejak tahun 1946, yang berfungsi sebagai simbol stabilitas politik. Tetapi era

---

<sup>104</sup> Tony Firman, 10 Februari 2019, *Thailand: Pusat Diaspora Cina Terbesar di Dunia*, <https://tirto.id/thailand-pusat-diaspora-cina-terbesar-di-dunia-df3J>, diakses pada 29 Maret 2019 (15.15 WIB)

<sup>105</sup> *Ibid.*

Bhumibol telah berakhir dan satu-satunya pewaris yang layak untuk menyandang raja Thailand berikutnya adalah, putra mahkota Maha Vajiralongkorn.

Untuk mempertahankan rezimnya, militer telah mengembangkan cara-cara untuk mendapatkan legitimasi di dalam negeri. Para junta militer mulai berkonsentrasi pada pengembangan kebijakan ekonomi yang mirip dengan program yang dilaksanakan selama pemerintahan Thaksin Shinawatra dari tahun 2001 hingga 2006. Militer membagikan tunjangan ekonomi kepada penduduk untuk mendapatkan kesetiaan dan kepuasan. Di antara upaya-upaya lain, militer telah memerintahkan pembayaran kepada petani miskin di bawah program subsidi beras. Kemampuan militer untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat merupakan elemen kunci dari tujuan untuk mendapatkan simpati dan kesetiaan dari rakyatnya.

Akan tetapi, keberhasilan dalam rencana yang dicanangkan ini sangat bergantung pada bagaimana negara-negara Barat merespons akan adanya mulai merosotnya kebebasan demokratis di Thailand pasca kudeta. Sanksi yang diberikan oleh negara-negara Barat memiliki kekuatan untuk melemahkan stabilitas yang diinginkan, yang dimana secara langsung mempengaruhi rakyat Thailand dan ekonomi Thailand secara besar-besaran. Sanksi yang efektif dapat memicu ketidakpuasan rakyat Thailand dan dapat menantang pemerintahan junta militer.

## **2.6 Ekspektasi Tiongkok Terhadap Thailand dalam Menjalin Kerjasama**

Di Myanmar dan Thailand, Tiongkok ingin menarik negara-negara yang lebih kecil namun ditempatkan secara strategis ke dalam orbit ekonomi, diplomatik, dan budaya Tiongkok. Tiongkok ingin menggusur Amerika Serikat sebagai kekuatan luar

paling berpengaruh di Asia Tenggara. *China Dream* termasuk menggunakan proyek-proyek infrastruktur besar-besaran, penjualan militer, dan keunggulan soft power dari akses ke pendidikan tinggi di Tiongkok untuk mempercepat gerakan Thailand keluar dari cengkaman Amerika. Tiongkok, sejak 2012, secara signifikan melemahkan identitas diplomatik ASEAN, dan Tiongkok ingin menggusur identitas regional yang berpusat pada ASEAN di Thailand.<sup>106</sup>

Dari tahun 1945 hingga akhir Perang Dingin, wilayah Pasifik telah menjadi adalah sumber daya bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat membangun struktur keamanan melalui serangkaian aliansi bilateral. Dengan biaya besar, struktur keamanan yang disediakan AS menyediakan perdamaian yang memungkinkan keajaiban ekonomi di Asia. Keamanan yang dipasok Amerika, perdagangan bebas, dan akses ke pasar Amerika memfasilitasi ledakan terbesar pertumbuhan ekonomi yang pernah disaksikan umat manusia. Sejak pertengahan 1970-an, dunia telah menyaksikan perluasan kekayaan terbesar, dalam sejarah umat manusia, dan sebagian besar terjadi di Asia. Pertama Jepang, Korea, Taiwan, dan Hong Kong muncul dengan kekuatan ekonominya.<sup>107</sup> Negara-negara ini kemudian diikuti oleh harimau ekonomi Asia Tenggara: Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia, dan bahkan Filipina. Sekarang Asia Tenggara sebagian besar telah mencapai perdamaian sejak 1993.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Cai, D. (2014). *ASEAN'S Strategic Approach Towards Security Relations with the US and China: Hedging through a Common Foreign and Security Policy*. ARMY COMMAND AND GENERAL STAFF COLLEGE FORT LEAVENWORTH KS.

<sup>107</sup> Klein, D. W. (2018). Japan and Europe in Chinese foreign relations. In *China and the World*. Routledge. Hal. 135-137

<sup>108</sup> *Ibid.*

Hampir tidak seorang pun akan memperkirakan di tahun 1960-an Asia Tenggara yang damai menghasilkan PDB gabungan tahunan sebesar USD \$ 2,4 triliun untuk 640 juta penduduknya pada tahun 2016.<sup>109</sup>

Dari tahun 1950-an hingga akhir 1970-an, Tiongkok dikenal pada dunia Internasional terutama karena mengeksport revolusi model makro-ekonomi Maoisme yang memberikan dampak negatif yang dimana hal tersebut menopang kemiskinan dan menumbuhkan bencana ekonomi dan sosial seperti *Great Leap Forward* dan Revolusi Kebudayaan.<sup>110</sup> Tiongkok mempersenjatai dan melatih para pemberontak yang berada di kalangan pedesaan yang pada akhirnya akan mampu mengancam pemerintah yang lemah dan miskin di Burma, Malaya dan Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam Selatan, dan Kamboja.<sup>111</sup>

Beragai peristiwa yang terjadi pun mengubah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Asia Tenggara, dan, pada akhirnya, melemahkan posisi Amerika Serikat di Asia, baik secara ekonomi maupun militer. Amerika Serikat meninggalkan operasi yang berbiaya besar karenan memiliki hasil yang buruk di Vietnam Selatan, Kamboja, dan Laos pada tahun 1975 dan keluar dari pangkalan militernya di Filipina pada tahun 1993.<sup>112</sup>

Pada tahun 1976, Mao Tse-tung yang sangat berideologis meninggal dan digantikan oleh Deng Xiaoping yang lebih berpikir secara pragmatis. Dengan

---

<sup>109</sup> *Ibid.* hal. 145

<sup>110</sup> Li, H. (2015). *Political thought and China's transformation: Ideas shaping reform in post-Mao China*. Springer.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Garver, J. W. (2015). *China's Quest: The History of the Foreign Relations of the People's Republic, revised and updated*. Oxford University Press.



pengecualian, invasi Vietnam dan pendudukan Kamboja pada tahun 1978 dan invasi Tiongkok ke Vietnam utara pada tahun 1979, Asia Tenggara, yang dulu dikenal sebagai Balkan Asia Tenggara, menjadi lebih damai dan memulai ekspansi yang dipimpin ekspor dengan cepat.<sup>113</sup> Di bawah Deng, Tiongkok berusaha memiankan perannya di kancah luar negerinya dan berhenti mencoba mengeksport revolusi ke Asia Tenggara. Meskipun sejarah seharusnya berakhir dengan berakhirnya Perang Dingin dengan dominasi demokrasi liberal dan kapitalisme pasar, tampaknya orang Tiongkok tidak mau berhenti secepat itu. Kombinasi pemerintahan otoriter Tiongkok dan pertumbuhan yang didorong oleh pasar yang dipimpin oleh negara mulai memikat Asia Tenggara. Tiongkok membuat dirinya lebih menarik bagi Asia Tenggara dengan memenuhi permintaan komoditas Asia Tenggara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika pertumbuhan eksplosif mulai mendominasi negara terbesar di dunia, negara-negara kecil di Asia Tenggara mulai memahami bahwa Tiongkok lebih memberikan prospek yang lebih cemerlang dan hanya memberikan sedikit masalah yang akan terjadi.<sup>114</sup>

Ketika Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat tampak seperti satu-satunya kekuatan besar yang berada di dunia, sebuah raksasa seperti Roma pada zamannya siap untuk mendominasi dunia untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dunia unipolar pun terbentuk karena ketidak sanggupannya Amerika di Irak dan Afghanistan dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat cepat, yang

---

<sup>113</sup> Dukalskis, A. (2017). *The authoritarian public sphere: Legitimation and autocratic power in North Korea, Burma, and China*. Routledge.

<sup>114</sup> *Ibid.*

didukung oleh kekuatan militer modern Tiongkok. Selama tiga ratus tahun terakhir, semua negara yang telah mengalami ekspansi ekonomi yang berkelanjutan dan cepat secara segera membangun kemampuan pembangunan yang cepat seperti, Inggris setelah revolusi industri, Jerman setelah penyatuannya, Jepang pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20, dan sekarang Tiongkok melakukan hal itu setelah memperoleh status sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia.<sup>115</sup> Oleh karena ini pula, Tiongkok dapat menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

## **2.7 Kerjasama Militer Thailand-Tiongkok Pasca Kudeta 2014**

Dengan berakhirnya krisis Kamboja, keamanan militer Sino-Thai lambat laun sudah tidak meninggi lagi. Hal itu berakhir setelah Thaksin memerintah yang dimana kebijakan nya yaitu mengembalikan dan memperbesar keamanan negara seperti semula.<sup>116</sup> Yang hasilnya, perdana menteri melakukan pendekatan intens lagi dengan Tiongkok. Pada akhirnya, tahun 2001 pertahanan bilateral antara Thailand dan Tiongkok terbentuk secara ad hoc.<sup>117</sup> Pada Juni 2001, Jenderal Chi menerima penawaran dari Chavalit untuk mengadakan pertemuan pertahanan mengenai pemulihan defisiensi. Pada pertemuan itu menghasilkan mekanisme untuk kerja sama bilateral mengenai militer dalam empat area; mengamati pelatihan militer masing-

---

<sup>115</sup> Berend, I. T. (2016). *An economic history of twentieth-century Europe: economic regimes from laissez-faire to globalization*. Cambridge University Press.

<sup>116</sup> Ian Storey, 2013, *Southeast East Asia and the Rise of China*, *Op.Cit.* hal 16.

<sup>117</sup> *Ibid.*

masing; senjata Tiongkok dijual ke Thailand; pertukaran pendidikan bagi tentara; dan pelatihan gabungan.<sup>118</sup>

Kerja sama Thailand dan Tiongkok tidak hanya dalam bidang militer akan tetapi lebih luas yang dimana merambah ke dalam segala bidang dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan jangka panjang, yakni peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, konektivitas, energi, pertanian, dan pertukaran tenaga kerja<sup>119</sup>. Pada kenyataannya hingga saat ini hubungan ekonomi Tiongkok dan Thailand, tidak mengalami hambatan, dan Tiongkok dinilai puas dengan kerjasama mereka berdua<sup>120</sup>. Dengan kata lain, Tiongkok mendapatkan kepentingan di negeri Thailand. Tiongkok saat ini mulai melangkah kepada perluasan hubungan militer dengan Thailand juga dikarenakan setelah masa kudeta yang dilakukan pada tahun 2014. Pada kenyataannya, Tiongkok yang tetap dijalar kepentingan nasional dan trans-nasionalnya, berusaha ingin menginterpretasikan kinerjanya sesuai dengan kondisi yang muncul setelah pasca perang dingin. Hal yang serius dikerjakan Tiongkok adalah strategi yang bertumpu pada kepentingan negaranya.

Kerja sama militer Thailand dengan Tiongkok adalah yang paling besar di antara semua anggota ASEAN dan telah ditandai dengan serangkaian perjanjian-perjanjian

---

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> Ade Marboen, *Thailand-China Perdalam Kerja Sama Bilateral*, Antara News, 12 Oktober 2013, <http://www.antaranews.com/berita/400133/thailand-china-perdalam-kerja-sama-bilateral> diakses pada 21 Mei 2019.

<sup>120</sup> *Sekilas Hubungan Tiongkok-Thailand*, 27 Januari 2016, diakses pada <http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/106526-sekilas-hubungan-Tiongkok-thailand> diakses pada 21 Mei 2019.

yang dibuat. Sejak kudeta tahun 2014, tempo diplomasi pertahanan Tiongkok-Thailand telah meningkat.

Kerja sama yang kuat pula ditunjukkan Thailand disaat mengundang Tiongkok ke dalam latihan militer Thailand-AS yaitu *Cobra Gold* tahun 2014, yang pada awalnya hanya mengamati, sekarang bersama-sama ikut serta. Pada bulan Mei 2014, Tiongkok berpartisipasi pertama kali sebagai pengamat dengan mengirimkan enam personil militernya.<sup>121</sup> Tiongkok pula telah mengirimkan militernya untuk mengamati militer *Cobra Gold* dari tahun 2002-sekarang. Pada tahun 2003, Tiongkok mengundang Thailand untuk melihat latihan militer Tiongkok. Thailand juga diundang untuk latihan amunisi dengan kode *Iron Fist* dengan 60 negara lainnya.<sup>122</sup>

Selanjutnya dalam konsultasi keamanan, kerjasama latihan militer dan latihan militer gabungan, Thailand dan Tiongkok juga bekerja sama dalam pertukaran militer untuk masalah pendidikan. Dalam beberapa tahun, tentara telah dikirimkan ke *National Defense College* di Tiongkok untuk belajar mengenai strategi berpikir militer Tiongkok. Semakin banyaknya tentara Thailand yang dikirimkan ke Tiongkok, kerja sama Tiongkok dan Thailand diharapkan semakin meningkat.

Pasca kudeta 2014, para jenderal Thailand telah meningkatkan momentum kerja sama pertahanan dengan Tiongkok. Dalam kondisi ini, dua perkembangan kerja sama pertahanan pun terjalin. Yang pertama adalah perluasan latihan untuk melakukan

---

<sup>121</sup> *Kekuatan Darat: Menjamin Keamanan dan Stabilitas di Indo Asia Pasifik*, Indo Asia Pacific Defense Forum Magazine, Volume 40, 2015.

<sup>122</sup> *Ibid.*

pelatihan antara angkatan udara Thailand dan Tiongkok. Pada prinsipnya kesepakatan untuk melakukan latihan gabungan udara telah dicapai pada tahun 2012, dan sejak itu kedua belah pihak terus terlibat dalam terus-menerus mencapai upaya ini. Pilot angkatan udara Thailand dan Tiongkok telah membiasakan diri dengan pesawat tempur masing-masing, Gripen dan J-10.

Keputusan angkatan udara Thailand untuk menggunakan jet Gripen buatan Swedia daripada F-16 yang dipasok AS adalah karena yang Gripen, seperti J-10, adalah pesawat generasi ke-4,5 sedangkan yang F-16 adalah generasi ke-4.<sup>123</sup> Namun, alasan yang lebih pasti adalah bahwa angkatan udara Thailand dibatasi berdasarkan ketentuan dari kontrak yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Thailand dalam menggunakan F-16 untuk melakukan latihan bersama dengan negara-negara seperti Tiongkok karena sensitivitas AS. Latihan udara Thailand-Tiongkok yang diberi nama sandi *Falcon Strike* tahun 2015 berlangsung mulai 12-30 November 2015 di Pangkalan Angkatan Udara Thailand, Royal Korat, dan merupakan yang pertama antara Angkatan Udara Tiongkok dengan angkatan udara Asia Tenggara.<sup>124</sup>

Perkembangan kedua adalah keputusan Thailand pada prinsipnya untuk membeli tiga kapal selam dari Tiongkok. Angkatan Laut Thailand berkeinginan untuk mendapatkan kapal selam sejak awal 1990-an, bukan karena ada alasan strategis yang menarik terutama untuk menyamakan kedudukan seperti yang dilakukan oleh tetangga

---

<sup>123</sup> Pamment, J. (2016). Sweden, Inc and the campaign to sell JAS-Gripen to the Swiss electorate. *Place Branding and Public Diplomacy*, 12(2-3), 218-231. Hal. 223

<sup>124</sup> Bergerson, K. (2016). China's Efforts to Counter US Forward Presence in the Asia Pacific. *US-China Economic and Security Review Commission*, hal. 3-5.

nya di Asia Tenggara. Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara ASEAN telah memulai program akuisisi kapal selam. Singapura saat ini mengoperasikan enam kapal selam yang telah diperbaharui yang sebelumnya milik Swedia dan telah memesan dua kapal baru dari Jerman; Malaysia memiliki dua kapal selam kelas *Scorpene* buatan Perancis; Vietnam telah menerima pengiriman dari Rusia empat kapal selam dengan dua lagi dipesan; dan Indonesia telah memesan tiga kapal selam kelas *Chang Bogo* dari Korea Selatan dan sedang mempertimbangkan untuk membeli setidaknya dua kapal selam dari Rusia.

Namun, mahal nya biaya kapal selam dan infrastruktur pelabuhan telah menjadi penghalang bagi ambisi Angkatan Laut Thailand dalam memiliki kapal selam. Pada tahun 2008, dalam upaya untuk memajukan kerja sama militer antara kedua negara yang bersamaan dengan adanya ketegangan antara hubungan AS-Thailand, Beijing menawarkan untuk menjual kepada Bangkok dua buah kapal selam Kelas 039 yang telah diperbarui.<sup>125</sup> Angkatan Laut Thailand menolak tawaran itu karena kapal-kapal itu tidak secanggih teknologi seperti kapal selam yang dimiliki oleh angkatan laut Asia Tenggara lainnya. Meskipun demikian, bahkan ketika angkatan laut Thailand mulai mencari pilihan lain (terutama Jerman dan Korea Selatan), penjualan kapal selam dengan Tiongkok tetap terbuka, terutama karena Tiongkok menawarkan untuk melatih para Angkatan Laut Thailand di Akademi Kapal Selam Qingdao. Setelah kudeta tahun 2014, Tiongkok terus mendorong untuk melakukan kesepakatan dengan menawarkan

---

<sup>125</sup> Ball, D. (2014). Arms modernization in Asia: an emerging complex arms race. In *The Global Arms Trade*. Routledge. Hal. 54-75.



peningkatan alutsista Angkatan Laut Thailand dalam bentuk tiga kapal selam S-26T yang bermesin diesel yang merupakan kelas Tipe 039A Yuan yang merupakan versi perbaikan dari Song seharga US \$ 1,03 miliar.<sup>126</sup> Menurut laporan media, kapal selam itu harus dilengkapi dengan propulsi yang tidak tergantung udara (yang memungkinkan kapal untuk tetap tenggelam dalam jangka waktu yang lebih lama), dan Tiongkok memasukkan tawaran yang sulit untuk ditolak yaitu pembaharuan sistem tempur, pelatihan kru, transfer teknologi, garansi dua tahun dan jangka waktu pembayaran lebih dari tujuh hingga sepuluh tahun.

Namun ketika kesepakatan diumumkan pada Juni 2015, analis pertahanan Thailand maupun dari luar mempertanyakan alasan strategis dari akuisisi yang diusulkan. Thailand tidak memiliki sengketa perbatasan wilayah atau maritim utama dengan tetangganya, dan tidak memiliki persaingan strategis di Asia Tenggara.<sup>127</sup> Sementara Thailand menghadapi sejumlah masalah keamanan transnasional, seperti penyelundupan manusia, perdagangan narkoba dan senjata, kapal selam tidak cocok untuk mengatasi ancaman tersebut. Juga tidak sesuai untuk operasi HA / DR. Kapal selam juga tidak akan berguna dalam konflik militer Thailand yang sedang berlangsung di Selatan dengan separatist Melayu-Muslim.

Kritik menyebabkan penundaan kesepakatan karena Perdana Menteri Prayuth meminta Angkatan Laut Thailand untuk terus mengevaluasi kesepakatan tersebut.

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Dalpino, C. (2019). STRATEGIC CONCERN DEEPENS. *Comparative Connections*, 21(1), 45-136. Hal. 56-57.

Angkatan Laut menanggapi dengan dokumen sembilan halaman yang menyatakan bahwa kapal selam diperlukan guna melindungi kepentingan ekonomi maritim negara itu, termasuk sumber daya, transportasi dan pariwisata. Faktanya, Thailand tertinggal dari negara tetangganya dalam hal kemampuan kapal selam, dan Kesepakatan Tiongkok menawarkan teknologi terbaik dengan harga terbaik.

Hal ini pun diperkuat pula dengan adanya konflik laut Tiongkok Selatan. Tiongkok disini ini ingin mendapatkan dukungan dari negara lain dan berusaha merangkul negara ASEAN, terutama Thailand. Maka pada tahun 2016, Pemerintah Tiongkok dan Thailand melakukan latihan militer bersama guna membantu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama militer antara Thailand dan Tiongkok.<sup>128</sup> Manuver perang bersama ini bertujuan untuk melebar kan kerja sama keamanan maritime dan pula meningkatkan level koordinasi. Latihan perang ini dilakukan di wilayah Chonburi. Selain itu pula, Tiongkok akan membangun pusat pemeliharaan dan produksi senjata Tiongkok di Thailand.

Menteri pertahanan Thailand telah mengkonfirmasi bahwa negaranya telah membeli 3 kapal selam dari Tiongkok seharga 1 miliar USD dengan 10 tahun pembayaran.<sup>129</sup> Thailand telah merasa sumber angkatan lautnya perlu diadakan. Dari hal ini Thailand sudah benar-benar merasa harus diadakannya penguatan dari segi

---

<sup>128</sup> Ahmad Taufik, *Perkuat Militer, China dan Thailand Adakan Latihan Bersama*, 23 Mei 2016, <http://news.okezone.com/read/2016/05/23/18/1395169/perkuat-militer-china-dan-thailand-adakan-latihan-bersama> diakses pada 21 Mei 2019.

<sup>129</sup> Zhang Tao, *Thailand Buys 3 Chinese Subs for 1 Billion Dollar*, Global Times, 05 Mei 2016, [http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2016-07/05/content\\_7134524.html](http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2016-07/05/content_7134524.html) diakses pada 21 Mei 2019.

militer. Bukan hanya dalam ekonomi akan tetapi, Thailand juga akan terus mengembangkan kekuatan militernya bersama Tiongkok.

Di Thailand, para penguasa berusaha mendikte opini publik negara ini bahwa kerja sama dengan Tiongkok mampu menciptakan peluang lapangan pekerjaan dan pariwisata. Dan pada akhirnya, hal ini akan menguntungkan para rakyatnya sendiri. Arti lain dari langkah Tiongkok adalah bahwa, Beijing sebanding dengan Amerika, dan memiliki kemampuan untuk membantu kawasan dan menggalang kerja sama regional khususnya wilayah ASEAN.

## **2.8 Kerjasama *Lancang-Mekong Cooperation (LMC)***

Wilayah Lancang-Mekong adalah salah satu daerah dengan potensi pengembangan terbesar di Asia dan sekitarnya. Lancang dan Mekong berbeda namanya, tetapi merujuk ke sungai yang sama — sungai penting yang melintasi Tiongkok dan Semenanjung Indo-Cina. Berasal dari Dataran Tinggi Qinghai-Tibet Tiongkok, sungai ini bersumber di Yushu Provinsi Qinghai. Itu disebut Sungai Lancang di Tiongkok, sementara di hilirnya setelah mengalir keluar dari Provinsi Yunnan, disebut Sungai Mekong, mengalir melintasi Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, berukuran panjang 4.880 kilometer, meliputi area seluas 795.000 kilometer persegi, dan memberi makan sekitar 326 juta orang. Bagi lima negara, Sungai Mekong adalah rumah bagi 230 juta orang dan memiliki PDB gabungan lebih dari US \$ 600 miliar dan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata hampir 7%.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Sunchindah, A. (2013). The Lancang-Mekong River Basin: Reflections on cooperation mechanisms pertaining to a shared watercourse. *RSIS Centre for Non-Traditional Security Studies No. PO13-01*.

Dihubungkan oleh gunung dan sungai, keenam negara LMC memiliki kesamaan budaya, dan menikmati keramahan dan persahabatan tradisional yang mendalam dan berbagi kepentingan keamanan dan pembangunan yang saling terkait.

Pada tahun 2012, Thailand mengusulkan inisiatif pembangunan berkelanjutan di Sub-wilayah Lancang-Mekong, yang mendapat respons positif dari pihak Tiongkok.<sup>131</sup> Pada KTT Tiongkok-ASEAN ke-17 yang diadakan pada November 2014, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengusulkan pembentukan Kerangka Kerja Sama Lancang-Mekong, yang disambut hangat oleh lima negara yang berada dialiran Sungai Mekong.<sup>132</sup> Pada 23 Maret 2016, Pertemuan Pemimpin LMC Pertama berhasil diadakan di Sanya, Provinsi Hainan, Tiongkok, yang mempertemukan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Laos Thongsing Thammavong, Wakil Presiden Myanmar Sai Mauk Kham, dan Wakil Perdana Menteri Vietnam Pham Binh Minh. Pertemuan tersebut memiliki tema yaitu "Sungai Bersama, Masa Depan Bersama", pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Sanya dalam Pertemuan Pemimpin Pertama Kerjasama Lancang-Mekong (LMC), dan secara resmi meluncurkan mekanisme LMC.<sup>133</sup>

LMC bertujuan untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara Sub-regional, meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka, mempersempit

---

<sup>131</sup> Li, X., Liu, J. P., Saito, Y., & Nguyen, V. L. (2017). Recent evolution of the Mekong Delta and the impacts of dams. *Earth-Science Reviews*, 175, 1-17. Hal. 04

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

kesenjangan pembangunan di antara negara-negara regional dan mendukung pembangunan Komunitas ASEAN serta mempromosikan implementasi Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan memajukan kerja sama Selatan-Selatan. LMC akan dilakukan dalam kerangka kerja yang menampilkan panduan kepada negara anggota, kerja sama menyeluruh dan partisipasi luas, dan mengikuti model yang dipandu oleh pemerintah, multi-partisipasi dan berorientasi proyek, yang bertujuan membangun komunitas masa depan yang damai dan sejahtera bersama di negara-negara yang dialiri Lancang-Mekong dan membangun LMC sebagai contoh bentuk baru hubungan internasional yang menampilkan kerjasama *win-win solution*.

Sungai Mekong atau disebut dengan sungai Lancang Jiang oleh Tiongkok, merupakan sungai yang terpanjang urutan ke-12 di dunia dan ke-7 di Asia.<sup>134</sup> Sungai tersebut merupakan jantung kehidupan bagi enam negara yang dialirinya. Mata air sungai Mekong berasal dari pegunungan di Tibet kemudian mengalir menuju Tiongkok, Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam.<sup>135</sup> Sungai Mekong di

---

<sup>134</sup> *Mekong River Facts*, Research Program on Water, Land, and Ecosystems, diakses dalam <https://wle-mekong.cgiar.org/mekong-river-facts/> (05/03/2019, 13.12 WIB).

<sup>135</sup> *The Lower Mekong Dams: A Transboundary Water Crisis*, International Rivers, diakses dalam <https://www.internationalrivers.org/resources/the-lower-mekong-dams-a-transboundary-water-crisis-7900> (05/03/2019, 13.29 WIB).



bagi menjadi dua bagian yaitu wilayah hulu dan hilir karena membentang sangat panjang.



Sumber: <https://en.wikipedia.org/wiki/Mekong>

Gambar 2.1 Sungai Lancang-Mekong

Bermula dari dataran tinggi Qinghai di wilayah Tibet yang mengalir sejauh 4000 km hingga bermuara di Laut Tiongkok Selatan.<sup>136</sup> Wilayah hulu dari sungai ini disebut dengan istilah Upper Basin (lembah atas) dimana wilayah yang tercakup didalamnya adalah Tiongkok dan Myanmar. Sedangkan bagian hilir dari sungai Mekong disebut dengan Lower Mekong Basin (lembah bawah) yang mengalir Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.

Sungai Mekong mempunyai potensi yang sangat besar jika dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara yang dilalui sungai tersebut. Salah satu sumber daya terbesar yang dapat dimanfaatkan adalah air sungai. Debit air yang dihasilkan rata-rata

---

<sup>136</sup>Mario Ritter, *China-led Groups Wants More Development on Mekong River*, Voice of America, diakses dalam <https://learningenglish.voanews.com/a/china-led-group-wants-more-development-on-mekong-river/4205103.html> (06/03/2019), 09.50 WIB.



mencapai 13.000 m<sup>3</sup>/tahun. Debit air yang besar, dapat dimanfaatkan sebagai hydropower atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA) oleh negara-negara yang dialiri sungai Mekong.<sup>137</sup>

Jumlah tenaga listrik yang dapat dihasilkan dari debit air sungai Mekong yaitu sekitar 23.000 MW (megawatt) di kawasan Upper Basin, dan 30.000 MW di kawasan Lower Basin.<sup>138</sup> Selain itu, sungai Mekong juga dijadikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat kawasan hilir. Negara-negara di kawasan hilir, memanfaatkan sungai Mekong untuk menangkap ikan, irigasi sawah, sebagai jalur transportasi dan kekayaan mineral dapat diambil dari dalam sungai tersebut.

Sungai Mekong juga disebut sebagai *transboundary river* dikarenakan tidak hanya mengalir satu negara saja. Setiap negara tepi sungai (riparian) Mekong tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi potensi yang ada secara berlebihan, karena harus berbagi dengan negara-negara lainnya. Maka dari itu, diperlukan sebuah wadah atau kerja sama di kawasan Indochina untuk mengatur pemanfaatan sungai Mekong agar tidak menimbulkan konflik antar negara riparian. Tahun 1995, empat negara hilir sungai Mekong telah membentuk organisasi pemanfaatan sungai Mekong secara berkelanjutan yang disebut dengan *Mekong River Commission* (MRC).<sup>139</sup> Namun,

---

<sup>137</sup> BINH, D. V., KANTOUSH, S., SUMI, T., MAI, N. T., & TRUNG, L. V. (2017). Study on the impacts of river-damming and climate change on the Mekong Delta of Vietnam.

<sup>138</sup> *Hydropower*, Mekong Flows, diakses dalam <http://mekongriver.info/hydropower> (07/03/2019, 13.32 WIB).

<sup>139</sup> *About MRC*, Mekong River Commission for Sustainable Development, diakses dalam <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/> (07/03/2019, 18.01 WIB).

Tiongkok dan Myanmar tidak tergabung ke dalam kerja sama tersebut dan hanya sebagai rekan dialog dari MRC.

Tiongkok yang terletak di wilayah hulu dan sebagai rising power country, menginisiasi sebuah kerja sama dengan lima negara Indochina. Kerja sama tersebut adalah Lancang Mekong Cooperation (LMC) yang resmi terbentuk pada tahun 2015 di Beijing. Sejak dua tahun setelah pembentukannya, LMC telah menggelar beberapa pertemuan untuk membentuk mekanisme kerja sama. Kemudian pada tahun 2018, telah mengagendakan *Five Year Plan of Action (2018-2022)* sebagai kerangka kerja sama antar negara anggotanya.

Kerja sama LMC yang diinisiasi oleh Tiongkok, menunjang kebijakan luar negeri Tiongkok mengenai “*Going out Strategy*” yang dicetuskan sejak tahun 1999 untuk melakukan investasi besar-besaran di luar negaranya.<sup>140</sup> Selain itu, Tiongkok juga bertujuan untuk mengimplementasikan tujuannya mengenai *One Belt, One Road Initiative* dan diawali dari Asia Tenggara dengan alasan kedekatan geografis serta hubungan sosial yang telah terjalin kuat.

Tujuan utama dari kerja sama LMC yang diketuai oleh Tiongkok adalah untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan diantara negara anggotanya. Kemudian untuk memperkuat hubungan multilateral antara Tiongkok dengan negara-negara kawasan Indochina. Selain itu tujuan lainnya adalah mencakup peningkatan

---

<sup>140</sup> Stephanie Jensen-Cromier, *Reflections on Chinese Companies' Global Investments in Hydropower Sector Between 2006-2017*, International Rivers, diakses dalam <https://www.internationalrivers.org/blogs/435/reflections-on-chinese-companies%E2%80%99-global-investments-in-the-hydropower-sector-between-2006> (07/03/2019, 18.23 WIB).

kesejahteraan negara anggotanya, dengan meminimalisir kemiskinan, perdagangan dan ekonomi lintas batas, pemanfaatan sumber daya air, dan sebagainya.

Kerjasama LMC yang dicetuskan oleh Tiongkok, berbeda dengan kerjasama MRC yang digagas oleh negara hilir sungai Mekong. Negara inisiator menjadi pembeda utama dari kedua kerjasama tersebut. Selain itu, cakupan kerjasama LMC lebih luas daripada MRC. MRC hanya fokus pada kerja sama pemanfaatan sungai secara berkelanjutan dan lebih berkonsentrasi pada bidang lingkungan. Sedangkan kerjasama LMC mencakup berbagai bidang kerja sama yang telah disebutkan sebelumnya. Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada keanggotaan kerjasama antara LMC dan MRC.

Anggota kerjasama dari MRC hanya mencakup Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos meninggalkan Myanmar dan Tiongkok. Berbeda dengan LMC yang mengajak seluruh negara yang dialiri oleh sungai Mekong untuk tergabung dalam kerja sama tersebut. Perbedaan lain yang mendasar adalah terkait dengan sumber keuangan yang menyokong jalannya kerja sama. Donor keuangan LMC murni dari Tiongkok. Sedangkan MRC didanai oleh *United Nation Development Program (UNDP)*.